



Pusat Analisis Keparlemenan  
Badan Keahlian Setjen DPR RI

## ANCAMAN KEPUNAHAN AKSARA NUSANTARA

**Dinar Wahyuni**  
Analisis Legislatif Ahli Madya  
[dinar.wahyuni@dpr.go.id](mailto:dinar.wahyuni@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Saat ini aksara nusantara semakin terpinggirkan oleh aksara latin yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Naskah dan prasasti yang memuat aksara tersebut juga banyak yang hilang. Berdasarkan data validasi vitalitas terhadap bahasa daerah yang dikaji Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, pada tahun 2018–2019, sebesar 52% atau setara dengan 95 bahasa daerah yang tersebar di berbagai provinsi statusnya mengarah kepada kepunahan.

Semua aksara nusantara berawal dari Prasasti Mulawarman beraksara Pallawa, peninggalan Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Prasasti dengan pahatan aksara Pallawa tersebut menjadi cikal bakal aksara asli Indonesia. Selain digunakan sebagai sistem penulisan, aksara nusantara juga menunjukkan jati diri bangsa sekaligus bukti kecerdasan lokal di masa lalu.

Aksara nusantara ditulis dengan media prasasti dan naskah. Adapun isinya beragam seperti sejumlah pengetahuan berbagai bidang, kearifan lokal, cara mengelola lingkungan, nasihat, ajaran moral maupun resep makanan.

Mengingat pentingnya aksara nusantara, pemerintah berupaya melindungi dan melestarikannya. Digitalisasi menjadi salah satu cara mengarsipkan dan melestarikan aksara nusantara. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) telah berhasil melakukan digitasi dan digitalisasi aksara nusantara dengan mendaftarkan beberapa aksara daerah ke dalam *Unicode* (standar teknis simbol, teks, dan sistem tulisan di dunia). Tiga aksara tersebut adalah aksara Jawa, Sunda, dan Bali.

Selain mendaftarkan tiga aksara tersebut ke dalam *Unicode*, Kemendikbud bersama PANDI juga telah mendaftarkan ke Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk mendapatkan standardisasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam penggunaan digital. Pada 2021 ketiga aksara tersebut resmi diakui sebagai aksara digital melalui terbitnya SK Kepala BSN dan ditetapkan SNI.

Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa tetapi hanya sekitar 18–20 persen yang mempunyai sistem aksara. Saat ini baru lima aksara yang sudah masuk SNI, yaitu Jawa, Sunda, Bali, Kawi, dan Pegon. Masih banyak aksara nusantara yang tersebar di seluruh wilayah. Upaya pelestarian mengalami sejumlah kendala. Generasi muda banyak yang tidak mengenal aksara nusantara. Keberadaan naskah hanya tersimpan sebagai benda keramat.

Di beberapa daerah seperti Jawa Barat, aksara Sunda sudah diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan di tingkat SD, SMP, dan SMA sekitar satu dekade terakhir. Namun, kedudukan aksara Sunda masih berupa materi pengajaran, hanya mengenal dan bisa membaca.

Upaya digitalisasi aksara Jawa juga ditolak *Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN) pada akhir 2020 lalu. Beberapa alasan penolakan ICANN adalah bahasa Jawa belum masuk sebagai bahasa administratif Indonesia di ISO 3166-1, belum cukup bukti bahwa aksara Jawa lazim digunakan oleh seluruh atau sebagian masyarakat Indonesia, dan status aksara Jawa di *Unicode* masih masuk dalam kategori *limited use script*.

## Atensi DPR

Ancaman kepunahan aksara nusantara harus dicegah. Berbagai kendala dalam pelestarian aksara nusantara menjadi tugas bersama untuk mengatasinya. Dalam hal ini, Komisi X DPR RI perlu mengawasi isu ini melalui fungsi-fungsi berikut.

1. Legislasi: menginisiasi penyusunan regulasi terkait pemanfaatan digitalisasi aksara nusantara agar dapat diaplikasikan pada perangkat digital yang beredar di Indonesia.
2. Pengawasan: menghimbau pemerintah untuk mendorong pemerintah daerah untuk lebih memanfaatkan ruang-ruang publik agar sosialisasi aksara nusantara dapat lebih efektif. Selain itu, mendorong pemerintah untuk memperbaiki tata kelola kebudayaan di Indonesia dengan terus berkoordinasi lintas pemangku kepentingan.

## Sumber

kemendikbud.go.id, 9 Desember 2021;  
kompas.com, 17 Januari 2021, 5 Mei 2021, & 9 September 2023; dan  
tempo.co, 8 September 2023.